



Pelaksanaan Tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Hendry Andry¹, Anggraini Dwi Milandry²

¹Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: ¹hendryandry@soc.uir.ac.id, ²anggrainidwimilandry@law.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif, menggunakan wawancara, observasi serta dilengkapi dengan studi kepustakaan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan empat indikator untuk mendeskripsikan berhasil atau tidaknya Syahbandar dalam melaksanakan tugasnya, yaitu indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini ialah pelaksanaan tugas syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan komunikasi yang terbentuk antara petugas Kantor Kesyahbandaran kepada penumpang hanya sebatas memeriksa tiket penumpang dan memberikan jadwal keberangkatan kapal. Kemudian, pemeriksaan uji kelayakan fisik kapal secara langsung tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh, karena kurangnya sumber daya manusia. Lebih lanjut, kurangnya tingkat kesadaran petugas terhadap seluruh pelaksanaan kewajibannya. Untuk indikator struktur birokrasi sejatinya telah terbentuk sebagaimana mestinya, namun secara praktek walaupun tugas sudah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, masih ditemukan pelaksanaan tugas yang belum efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas Syahbandar, Kantor Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru

Abstract

This research aims to find out about the implementation of the harbormaster's duties at the Class III Harbormaster and Authority Office of Sungai Duku Port, Pekanbaru. The research method used is descriptive qualitative, uses interviews, observations and is supplemented by literature study. In this research, the author uses four indicators to describe the success or failure of the harbor master in carrying out his duties, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure indicator's. The results of this research are that the implementation hasn't been carried out optimally. This is because the communication between Harbormaster's Office officers and passengers is limited to checking passenger tickets and providing ship departure schedules. Then, direct physical feasibility tests of ships cannot be carried out thoroughly, due to a lack of human resources. Furthermore, there is a lack of awareness among officers regarding the implementation of all their obligations. In terms of, the bureaucratic structure indicator's has been, actually formed as it should be, but in practice, even though the tasks have been carried out in accordance with the respective division of tasks, but in fact the implementation still not effective and efficient.

Keywords: Implementation, Harbor Master Duties, Duku River Port Office Pekanbaru

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki ribuan pulau. Salah satu faktor yang menandai eksistensi Indonesia sebagai negara maritim ialah kepemilikan persentase wilayah laut Indonesia yang 80% lebih besar daripada wilayah daratan yang hanya sebesar 20% saja. Kemudian, apabila memperhatikan

posisi geografis, maka posisi Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan dunia (A. T. Nugraha & Irman, 2014). Lebih lanjut, salah satu narahubung terbaik antar sesama pulau (dari Sabang hingga Merauke) ialah menggunakan transportasi laut. Selain berperan sebagai sarana pengangkutan perairan, transportasi laut juga dapat menjadi penunjang untuk mendorong dan menggerakkan pertumbuhan setiap daerah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya (alam maupun manusia) terbaik, dalam upaya meningkatkan dan meratakan pembangunan nasional (Suryani et al., 2018). Secara umum, dalam pembangunan sistem ekonomi sebuah negara, transportasi memegang peranan penting untuk meningkatkan pendapatan nasional, mengembangkan industri nasional serta menciptakan dan memelihara kesempatan kerja bagi masyarakat. Bukan hanya berperan penting dalam pembangunan dalam aspek ekonomi suatu negara saja, ternyata transportasi juga bisa meningkatkan pembangunan bangsa di aspek non ekonomi, yaitu dapat meningkatkan integritas, pertahanan dan juga keamanan nasional suatu bangsa (Kadarisman et al., 2016). Penyelenggaraan lalu lintas air menggunakan transportasi laut harus dilakukan dan ditingkatkan secara berkesinambungan, sehingga jangkauan serta pelayanannya dapat lebih luas serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh lini masyarakat (Ilham & D, 2015). Kemudian, apabila dibandingkan dengan jasa penyelenggaraan transportasi angkutan udara yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi, maka transportasi angkutan laut (dalam hal ini kapal laut) lebih dapat dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat, karena kapal laut memiliki kapasitas luas namun berbiaya murah.

Penyelenggaraan lalu lintas air menggunakan transportasi laut, tidak terlepas dari adanya administrasi dan administrasi publik. Administrasi adalah segala proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya (Andry, 2020). Administrasi memiliki beberapa unsur, yaitu dua orang atau lebih; adanya tugas yang akan dilakukan, ada tujuan, serta tersedianya peralatan dan perlengkapan (Andry, 2023). Sedangkan administrasi publik merupakan suatu sistem yang berusaha menjawab permasalahan masyarakat. Lebih lanjut, pada hakekatnya administrasi publik disiplin ilmu yang menanggapi berbagai permasalahan terkait masalah masyarakat (*public affairs*) dan manajemen dari usaha masyarakat (*public business*) (Astuti et al., 2020). Selain terkait dengan proses administrasi, penyelenggaraan lalu lintas air menggunakan transportasi laut juga selalu berkaitan organisasi serta manajemen keselamatan dan keamanan pelayaran.

Organisasi merupakan sekelompok manusia (*group of people*) yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan Bersama (*common goals*). Menurut Stephen P. Robbins, organisasi unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang lama, beranggotakan dua orang atau lebih. Mereka bekerja sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelum unit terkait didirikan (Sobirin, 2014). Kemudian dalam penyelenggaraan lalu lintas air menggunakan transportasi laut yang tidak kalah penting untuk diperhatikan ialah terkait manajemen keselamatan dan keamanan pelayaran. Merujuk pada Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan keselamatan dan keamanan pelayaran adalah terwujudnya seluruh persyaratan terkait keselamatan dan keamanan angkutan perairan di kepelabuhan serta lingkungan kelautan. Kemudian yang dimaksud dengan kepelabuhan ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Pelabuhan untuk menunjang, kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. Hal ini telah diatur pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau. Wilayah Provinsi Riau memiliki sungai-sungai kecil hingga sungai yang cukup besar, bahkan kota Pekanbaru dibelah oleh sebuah sungai yang merupakan sungai terdalam di Indonesia, yang bermuara ke Selat Malaka, yaitu Sungai Siak. Kemudian, dengan semakin berkembangnya teknologi di bidang transportasi, ternyata hingga saat ini dalam kesehariannya, masyarakat kota Pekanbaru dan sekitarnya, masih menggunakan Sungai Siak sebagai sarana pelayaran dan sarana perniagaan. Pelayaran di Sungai Siak masih digunakan untuk mengangkut barang dan memberikan pelayanan jasa sampai ke daerah pedalaman.

Aktivitas pelayaran untuk mengangkut barang dan memberikan pelayanan jasa sampai ke daerah pedalaman dimulai dari sebuah pelabuhan tempat bersandarnya alat transportasi angkutan laut tersebut, yaitu sebuah kapal yang akan membawa penumpang dan barang ke berbagai daerah tujuan (Septiawan et al., 2022). Di Kota Pekanbaru terdapat sebuah Pelabuhan besar dan terletak di tepi Sungai Siak yang bernama Pelabuhan Sungai Duku. Hingga saat ini Pelabuhan Sungai Duku masih mengambil peran penting dalam menunjang kegiatan perniagaan di Kota Pekanbaru. Pelabuhan Sungai Duku melayani berbagai aktivitas mulai dari bongkar muat barang hingga naik turun penumpang (S. Nugraha, 2023).

Kemudian, sebagai penyelenggara dan pengelola pelayanan transportasi angkutan laut, Pelabuhan Sungai Duku diharapkan bisa memanfaatkan Sungai sebagai sarana penghubung daerah. Dengan adanya angkutan transportasi perairan baik sungai tersebut, berarti pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan transportasi air sudah difasilitasi dan dilaksanakan. Namun, setiap menggunakan berbagai jenis moda transportasi (baik angkutan darat, udara maupun perairan) pasti tetap ada resiko, seperti terjadinya kecelakaan. Secara umum, untuk angkutan laut atau angkutan perairan biasanya resiko kecelakaan disebabkan oleh dua hal yaitu disebabkan oleh alam (seperti angin topan, cuaca buruk, gelombang besar dan sebagainya, yang menyebabkan kapal gagal bersandar di pelabuhan tujuan) dan kealpaan manusia (kelalaian nahkoda, ABK ataupun pihak Syahbandar yang tidak teliti dalam memeriksa kelengkapan dan kelayakan sebuah kapal ketika berangkat, berlayar serta membawa penumpang ataupun barang muatan).

Menurut penulis, salah satu faktor yang menyebabkan beberapa hal tersebut terjadi ialah karena sistem keselamatan pelayaran belum dilaksanakan dengan maksimal. Karena ternyata, masih ditemukan pihak pengelola jasa transportasi angkutan laut yang tidak mengikuti ketentuan dan aturan berlaku, sehingga berakibat dengan terjadinya kecelakaan. Dengan kata lain, menurut penulis, untuk mewujudkan transportasi angkutan laut yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan berdayaguna hingga dapat mengantarkan barang muatan maupun penumpang selamat sampai tujuan, maka dibutuhkan bersinerginya beberapa pihak terkait yaitu pihak pemerintah yang berperan sebagai regulator, pihak pengusaha yang berperan operator, dan pihak masyarakat yang berperan sebagai pengguna. Lebih lanjut, untuk dapat melancarkan dan untuk meminimalisir resiko terhadap segala aktivitas angkutan laut seperti adanya pemeriksaan tiket keberangkatan penumpang, teraturnya jadwal keberangkatan kapal, menjaga operasional kapal agar tetap di trayeknya dan kelayakan kapal yang beroperasi (baik kapal penumpang, kapal peti kemas, kapal barang umum, atau kapal ro-ro), maka sudah semestinya pihak pengelola pelabuhan (yang dalam hal ini adalah Syahbandar) untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan serta melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pelayaran. Syahbandar bertugas di wilayah Pelabuhan dan diangkat oleh Menteri. Hal ini sejalan dengan yang telah diatur pada Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan kata lain, secara umum tugas pokok Syahbandar ialah melancarkan segala aktivitas angkutan laut yang meliputi keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan. Kemudian dengan mengingat pentingnya tugas Syahbandar dalam penyelenggaraan pengangkutan laut, maka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Syahbandar menarik untuk dikaji secara komprehensif karena penulis menemukan fenomena di Pelabuhan Sungai Duku yaitu belum maksimalnya pelaksanaan tugas Syahbandar dalam pemeriksaan keselamatan dan keamanan kapal penumpang sebelum berlayar, sehingga masih ditemukan banyak permasalahan keselamatan pengangkutan laut dan atau kecelakaan laut yang disebabkan karena kelalaian pihak Syahbandar dalam melaksanakan tugas kepelabuhannya

Berdasarkan pemaparan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pelaksanaan Tugas Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III di Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru?”. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sungai Duku Pekanbaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Kota Pekanbaru, yang beralamat di Jalan Tanjung Datuk, Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Penelitian ini diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi maupun fenomena realitas sosial yang terjadi dimasyarakat dan dikaitkan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan kesimpulan yang dapat menyelesaikan masalah terkait (Sugiyono, 2015). Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Dengan kata lain, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai cara menyelesaikan berbagai masalah yang timbul di kehidupan nyata masyarakat (*natural setting*) yang holistik, kompleks dan rinci (Murdiyanto, 2020). Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu teknik pengumpulan data primer (studi lapangan) dan data sekunder (studi kepustakaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan terkait pelaksanaan tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, ada baiknya penulis memaparkan gambaran umum Kota Pekanbaru, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku serta Tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau yang memiliki luas sekitar 632.27 km². Kota Pekanbaru dipisahkan oleh Sungai Siak dan memiliki beberapa anak Sungai yang mengalir dari barat ke Timur, yaitu Sungai Air Hitam, Sungai Senapelan, Sungai Umban Sari, Sungai Sibin, Sungai Setukul, Sungai Pengambang, Sungai Tampan, Sungai Sail, Sungai Ukui, Sungai Sago dan Sungai Limau. Lebih lanjut, sebagian besar penduduk yang tinggal dan menetap di Kota Pekanbaru ialah penduduk bersuku Melayu. Namun, oleh karena Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, juga banyak kaum pendatang yang berasal dari suku lain seperti suku Minang, Jawa, Batak dan lain sebagainya. Kemudian profesi penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh beberapa profesi yaitu sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta serta pedagang.

Apabila wilayah kota Pekanbaru dilihat dari jumlah kecamatan dan kelurahan maka Kota Pekanbaru memiliki 15 Kecamatan dan 83 Kelurahan. Terkhusus data terkait pembagian wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan, dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Pembagian Wilayah Kota Pekanbaru Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1	Marpoyan Damai	6
2	Sail	3
3	Payung Sekaki	6
4	Pekanbaru Kota	6
5	Sukajadi	7
6	Limapuluh	4
7	Bukit Raya	5
8	Senapelan	6
9	Tenayan Raya	8
10	Kulim	5
11	Binawidya	5
12	Rumbai	6
13	Rumbai Timur	5
14	Rumbai Barat	6
15	Tuah Madani	5
TOTAL		83

Sejak awal abad ke-16, proses perkembangan bisnis masyarakat memberikan dorongan tumbuhnya berbagai kota bandar perdagangan dan pelayaran sepanjang pantai kepulauan Nusantara yang membentang dari ujung barat sampai ke ujung timur. Sejak saat itulah dikenal kedudukan kesyahbandaran yang berada pada setiap Pelabuhan yang bertugas mengunjungi kapal sandar mengawasi kegiatan perdagangan, di area Pelabuhan, pergudangan dan pasar (Fauziyah, 2012). Pada masa itu, terdapat beberapa Kerajaan yang memiliki Syahbandar, diantaranya, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak yang memiliki Pelabuhan Jepara. Lebih lanjut, juga terdapat pelabuhan-pelabuhan lainnya yang tersebar diseluruh Nusantara seperti Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Banten, Pelabuhan Tuban, Pelabuhan Martapura, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Gresik Pelabuhan Banjarmasin dan lain sebagainya (Putra & Muhsin, 2022). Pada zaman tersebut, Syahbandar berperan sebagai pihak yang berwenang memungut bea masuk dan keluar dalam kegiatan perdagangan. Apapun nama punggutannya, pada masa itulah bentuk awal dari pelaksanaan kegiatan kebeacukaian di Indonesia (Purba & Murlianti, 2017).

Dalam rangka memperlancar kegiatan ekspor-impor dan Pembangunan daerah diberbagai sektor pertanian, perdagangan, industri dan sektor lainnya, maka pada Tahun 1976, di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Lima Puluh, didirikan sebuah Pelabuhan yang diberi nama Pelabuhan Sungai Duku. Pada awal pembangunannya Pelabuhan Sungai Duku hanya berfokus dengan pengangkutan barang komoditi yang berasal dari Siak, Sungai Apit dan Bengkalis. Namun, pada awal tahun 1990-an Pelabuhan Sungai Duku juga memfokuskan pelayanannya untuk mengangkut penumpang. Awal tahun 1999 perkembangan

Pelabuhan Sungai Duku mengalami peningkatan yang sangat signifikan, karena kapal yang berlabuh di Pelabuhan Sungai Duku bukan hanya kapal yang berasal dari Provinsi Riau saja, melainkan berasal dari seperti Tanjungpinang, Batam, Karimun dan bahkan kapal dari Malaysia memilih Pelabuhan Sungai Duku sebagai rute pelayarannya (Fitria et al., 2020).

Peraturan Menteri Perhubungan No.KM.36 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pekanbaru merupakan dasar hukum berdirinya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pekanbaru. Kantor tersebut merupakan kantor administrasi atau unit pelaksana teknis (UPT) yang berlokasi dan bertanggungjawab kepada Dirjend Perhubungan Laut. Adapun peran dan fungsi Syahbandar dalam aktivitas pelayaran ialah mengawasi pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan kapal termasuk melakukan pengawasan serta penegakan hukum di kepelabuhan, pengangkutan maupun melindungi lingkungan kelautan di pelabuhan. Selain menjalankan berbagai fungsi tersebut, Syahbandar juga bertugas untuk mengakomodasi pengimplementasian pencarian dan/atau penyelamatan ketika terjadi kecelakaan pelayaran. Pengangkutan seorang Syahbandar akan dilakukan oleh Menteri ketika pihak terkait telah lulus dan memenuhi kompetensi di seluruh aspek keselamatan, keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Kemudian, secara universal tugas dari syahbandar ialah melakukan pengawasan atas kelayakan kapal (termasuk pengisian bahan bakar kapal, naik-turunnya penumpang maupun alih-muat barang angkutan ke kapal bersangkutan, mengakomodasi sistem penganggulangan dan perbaikan pencemaran lingkungan karena angkutan limbah berbahaya serta memimpin penyelamatan ketika terjadi kebakaran pada saat kapal sedang berlayar) agar terciptanya keselamatan serta keamanan dalam pelayaran. Selain itu, syahbandar juga bertugas untuk mengawasi tertibnya lalu-lintas maupun alur pelayaran kapal di perairan pelabuhan, sekaligus mengawasi pekerjaan bawah air serta kegiatan penundaan keberangkatan kapal.

Untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut, syahbandar di bagi dalam beberapa seksi yaitu seksi laik layar, seksi penyelamatan dan penanggulangan pencemaran dan seksi kepelautan. Secara umum tugas dan fungsi dari seksi laik layar ialah menciptakan dan melakukan pengawasan terhadap lancar dan tertibnya seluruh kegiatan di sebuah pelabuhan, seperti pembentukan jadwal dan jalur pelayaran keluar-masuk kapal (baik kapal nasional maupun kapal asing, mengakomodasi persiapan data untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar, memeriksa dan melakukan pengawasan kelayakan berlayar pada setiap kapal yang keluar-masuk di wilayah perairan pelabuhan, serta mengawasi ditundanya dan/atau tertundanya keberangkatan kapal penumpang maupun kapal angkutan barang. Sementara itu, seksi penyelamatan dan penanggulangan pencemaran bertugas untuk mengakomodasi sistem penganggulangan dan perbaikan pencemaran lingkungan karena angkutan limbah berbahaya serta memimpin penyelamatan ketika terjadi kebakaran pada saat kapal sedang berlayar. Sedangkan, seksi kepelautan memiliki tugas untuk melakukan persiapan data untuk segala dokumen pelaut, termasuk perjanjian kerja nakhoda maupun ABK.

Ketika mengimplementasikan tugas dan fungsinya (terkhusus dalam hal pengawasan dan pemeriksaan kelayakan kapal), Syahbandar selalu bekerja sama dengan Biro Klasifikasi Indonesia. Adapun peran Biro Klasifikasi Indonesia dalam melakukan pemeriksaan kelayakan kapal adalah memeriksa lambung kapal, perangkat peralatan mesin dan listrik kapal, komposisi arsitektur kapal serta mengontrol seluruh perangkat yang dibutuhkan dan digunakan dalam pendayagunaan kapal yang akan berlayar. Biasanya hasil uji kelayakan kapal dari Biro Klasifikasi Indonesia akan dijadikan pedoman bagi perusahaan asuransi untuk memberikan asuransi kapal. Sementara itu, peran Syahbandar akan turut serta ketika melakukan pengamatan terhadap seluruh dokumen serta surat kapal (*manifest*) (Karso, 2021).

Pada dasarnya pelaksanaan tugas yang harus dilakukan pemerintah (dalam hal ini Syahbandar) harus sesuai dengan kondisi yang terjadi didalam dan diluar lapangan dan memiliki beberapa unsur serta upaya maupun alat pendukung. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas pemerintah merupakan sebuah proses yang krusial dan harus dipersiapkan serta di direncanakan dengan baik, sehingga tujuan yang ingin capai dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Menurut Edward III (Subarsono, 2011), pelaksanaan tugas sebuah organisasi (dalam hal ini Kantor kesyahbandaran) dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Oleh karena itu untuk memaparkan pelaksanaan tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru penulis menggunakan 4 (empat) indikator yaitu indikator komunikasi, indikator sumber daya, indikator disposisi dan indikator struktur birokrasi. Hal ini disebabkan, karena penulis telah menyimpulkan bahwa pelaksanaan tugas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menggerakkan seluruh anggota organisasi (Kantor Kesyahbandaran) sehingga tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai dengan baik, efektif dan efisien.

Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau tugas seseorang dalam suatu organisasi. Komunikasi adalah proses interaksi antara dua orang atau lebih serta unsur atau bagian seperti komunikator dengan komunikan untuk membangun kebersamaan, mencapai tujuan dan saling memahami diantara satu dengan yang lain (Rahmawati, 2017). Komunikasi yang dilakukan secara efektif akan berpengaruh terhadap proses keberhasilan organisasi dalam menyampaikan pesan yang diinginkan (Fauzi et al., 2022). Komunikasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu, secara langsung (dengan lisan, sehingga memudahkan para pihak untuk bisa saling mengerti) dan secara tidak langsung (melalui media tertentu, seperti bahasa tubuh, tulisan, handphone, televisi dan lain sebagainya) (Puspitasari & Danaya, 2022).

Dalam penelitian ini indikator komunikasi akan terlaksana apabila dalam melaksanakan tugas Syahbandar (dalam hal ini Seksi laik layar, seksi penyelamatan dan penganggulangan pencemaran serta seksi kepelabuhan) dinilai berdasarkan tiga poin, yaitu informasi kebijakan, sosialisasi dan koordinasi. Komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah proses interaksi antara satu petugas dengan petugas lain di kantor kesyahbandaran dengan masyarakat, ketika sedang menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan beberapa pertanyaan wawancara dengan salah satu petugas kesyahbandaran, yaitu bapak Syafrudin Tanjung yang merupakan Kepala Pos Sungai Duku Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli di Kantor KSOP Kelas III Pekanbaru menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya pihak-nya telah mengimplementasikan standar pelaksanaan komunikasi dengan cukup baik dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, berdasarkan observasi yang penulis lihat dilapangan, komunikasi yang dilakukan pihak Kantor Kesyahbandaran dalam upaya melaksanakan tugasnya belum dijalankan dengan sesuai rencana maupun tujuan dari tugas tersebut. hal ini dibuktikan dengan kurangnya pelaksanaan sosialisasi yang diberikan untuk masyarakat (penumpang maupun pemilik kapal serta pengusaha pengangkutan barang) yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadam kebakaran di perairan Pelabuhan.

Sementara itu, berdasarkan wawancara dengan pihak penyusun rencana induk dan pengembangan Pelabuhan seksi lalu lintas angkutan laut dan usaha kepelabuhan di Kantor KSOP Kelas III Pekanbaru, yaitu bapak Muhammad Afrizal, Kantor Kesyahbandaran selalu melakukan komunikasi yang intensif ketika membuat pendataan keberangkatan kapal, pemeriksaan tiket penumpang dan pemeriksaan keselamatan kapal, sehingga dengan dilakukannya 3 (tiga) hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pihak Kantor Kesyahbandaran dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan komunikasi secara langsung (ketika para petugas memeriksa tiket penumpang) serta komunikasi secara tidak langsung (dengan melakukan pengawasan terhadap kelengkapan berkas data penumpang dan barang serta memeriksa surat administrasi lainnya yang berkaitan dengan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal).

Dengan kata lain, dapat disimpulkan, berdasarkan pengamatan yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara penulis dalam penelitian ini maka hanya dua indikator penilaian (indikator informasi kebijakan dan pelaksanaan indikator koordinasi) yang telah terpenuhi dan telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh pihak Kantor Kesyahbandaran. Namun, untuk indikator pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat, dalam hal informasi terkait penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadam kebakaran di perairan Pelabuhan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika berbicara mengenai pelaksanaan tugas sebuah organisasi, karena setiap menjalankan sebuah organisasi harus didukung dengan sumber daya yang memadai dan berkualitas. Pada penelitian ini yang dimaksud sumber daya meliputi sumber daya manusia yang keberhasilannya dilihat berdasarkan kecukupan staf Kantor Kesyahbandaran, Kemudian sumber daya anggaran yang juga merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan sebuah organisasi, karena jika anggaran tidak mencukupi maka, pelaksanaan tugas juga tidak akan bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Sumber daya yang selanjutnya ialah sumber daya berbentuk tersedianya sarana dan prasarana yang dapat menunjang anggota organisasi untuk melaksanakan tugasnya.

Untuk Sumber Daya Manusia, yang bertugas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, keseluruhannya berjumlah 4 (empat) petugas yakni terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor Kesyahbandaran, 1 (satu) orang Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli, 1 (satu) orang Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, dan 1 (satu) orang Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengidentifikasi bahwa keseluruhan anggota yang ditugaskan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru telah melaksanakan kewajiban dan tugas nya masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih

lanjut, berdasarkan hasil observasi penulis di lokasi penelitian, maka penulis temukan bahwa pelaksanaan tugas untuk memeriksa fisik kapal secara langsung tidak seluruhnya dapat terlaksana. Hal ini terjawab ketika penulis melakukan wawancara dengan pihak Seksi Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli yang menyatakan bahwa menurutnya jumlah petugas yang rekrut sudah mencukupi, namun untuk sumber daya manusia yang langsung datang ke kapal untuk memeriksa kelaikan kapal masih kurang memadai. Oleh karena kurangnya tenaga untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal secara berkala, maka dapat disimpulkan pelaksanaan tugas tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Apabila hal ini, terus terjadi dalam jangka waktu yang panjang maka akan membahayakan perjalanan angkutan laut (baik penumpang maupun barang) yang ada.

Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik moral, watak dan sikap yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan (Hafid, 2016). Disposisi adalah karakteristik penting yang dimiliki pelaksana kebijakan atau tugas seperti kejujuran dan berkomitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan seorang pelaksana tugas tetap berada dalam program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik secara efektif dan efisien. Sedangkan berkomitmen yang tinggi akan membuat pelaksana kebijakan yang dalam hal ini tugas-tugas dan kewajiban yang melekat, antusias menjalankan wewenang, fungsi dan tanggungjawab sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Berkaitan dengan indikator ini pertanyaan yang diajukan kepada informan mengenai integritas moral yang dimiliki oleh para Sumber Daya Manusia yang bertugas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru. Berdasarkan informasi dari hasil wawancara Kantor Kesyahbandaran Sungai Duku Pekanbaru memiliki integritas yang tinggi. Sebaliknya dari hasil pengamatan di lapangan integritas moral Sumber Daya Manusia, belumlah mencapai ke tingkat yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan yang berkaitan dengan integritas moral ini dengan cara memberikan siraman rohani sesuai dengan keyakinan masing-masing dan diberikan pendidikan karakter. Hal ini diharapkan bisa mengangkat moral dan meningkatkan moral integritas Sumber Daya Manusia dalam organisasi.

Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi terdiri dari 2 aspek yaitu aspek mekanisme dan aspek struktur birokrasi itu sendiri (Desrinelti et al., 2021). Pertama aspek mekanisme berupa standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam beraktifitas atau bertindak agar tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Kedua aspek struktur birokrasi itu sendiri dimana jika sebuah organisasi memiliki struktur yang panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktifitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Pertanyaan yang diajukan kepada informan berkaitan dengan struktur birokrasi ini berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan tugas. Dari hasil wawancara dapat diidentifikasi bahwa pelaksanaan tugas telah sesuai dengan struktur organisasi yang ada dan sejalan dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Namun, dari hasil pengamatan di lapangan walaupun tugas sudah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, masih ditemukan pelaksanaan tugas yang belum efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena tidak rutinnya pengawasan yang dilakukan terhadap objek tugas dan saat dilakukan pengawasan terkesan hanya formalitas saja dengan mengisi data tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut penulis, diperlukan keseriusan pelaksanaan tugas saat melakukan pengawasan dan pemeriksaan kapal yang akan beroperasi sebagai angkutan laut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan waskat atau pengawasan melekat kepada petugas yang bertugas, sehingga dapat terciptanya kelancaran perjalanan laut dan mengurangi resiko kecelakaan yang diakibatkan karena ketidakhati-hatian maupun kecerobohan petugas yang bertugas.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Tugas Syahbandar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru, belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat yaitu komunikasi yang terbentuk antara petugas Kantor Kesyahbandaran kepada penumpang hanya sebatas memeriksa tiket penumpang dan memberikan jadwal keberangkatan kapal. Namun, terkait sosialisasi tentang penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadam kebakaran di perairan Pelabuhan, belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kemudian, kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk melaksanakan uji kelaiklautan kapal (fisik kapal) secara langsung, mengakibatkan pemeriksaan yang harusnya dilakukan secara menyeluruh menjadi tidak dapat dilaksanakan. Begitupun, indikator disposisi, terkait kurangnya tingkat kesadaran petugas terhadap seluruh pelaksanaan kewajibannya. Lebih lanjut, struktur birokrasi yang ada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku

Pekanbaru, secara struktur sejatinya telah terbentuk sebagaimana mestinya, namun secara praktek walaupun tugas sudah dilaksanakan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing, masih ditemukan pelaksanaan tugas yang belum efektif dan efisien. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar selaku pejabat yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan tugas Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kelas III Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, H. (2020). *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Marpoyan Tujuh Publishing.
- Andry, H. (2023). Evaluasi Pengelolaan Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. *Eqien : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2).
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Program Studi Doktor Administrasi Publik (FISIPOL UNDIP Press).
- Desrinelti, Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan Publik: Konsep Pelaksanaan. *JRTI(Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1).
- Fauzi, A., Fikri, A. W. N., Nitami, A. D., Firmansyah, A., Lestari, F. A., Widyananta, R. Y., Rahmah, T. S. N., & Pradana, T. W. (2022). Peran Komunikasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Organisasi di PT.Multi Daya Bangun Mandiri (Literature Review MSDM). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)*, 3(6).
- Fauziyah, S. (2012). Pasar Pada Masa Kesultanan Islam Banten. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 13(1).
- Fitria, D., Isjoni, & Asril. (2020). Sejarah Pelabuhan Sungai Duku di Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Tahun 1976-2019. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 7(2).
- Hafid, A. (2016). Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu. *Katalogis*, 4(9).
- Ilham, C. I., & D, W. (2015). Keseimbangan Antara Pendapatan dan Biaya Operasional Kapal Penyebrangan Lintas Jangkar-Kalianget. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, 2(1).
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati. (2016). Kebijakan Manajemen Transportasi Darat dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kota Depok. *JMTRANSLOG: Jurnal Manajemen Transportasi Dan Logistik*, 3(1).
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi Kebijakan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sebagai Kepala Pemerintahan di Pelabuhan Guna Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Secara Profesional dan Akuntabel dalam rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Lingkungan Kepelabuhan*. Penerbit Insania.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. LP2M Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nugraha, A. T., & Irman. (2014). Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia sebagai Negara Maritim. *JS: Jurnal Selat*, 2(1).
- Nugraha, S. (2023). Pelabuhan Sungai Duku, Terminal Kapal di Sungai Terdalam di Indonesia. *Rumah123.Com*. <https://www.rumah123.com/explore/kota-pekanbaru/pelabuhan-sungai-duku/>
- Purba, J., & Murlianti, S. (2017). *Sejarah Perkembangan Pelabuhan Tanjung Laut di Bontang Provinsi Kalimantan Timur*. Penerbit Kepel Press.
- Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2022). Pentingnya Peranan Komunikasi Dalam Organisasi: Lisan, Non Verbal dan Tertulis (Literature Review Manajemen). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(3).
- Putra, J. S., & Muhsin, I. (2022). Kontribusi Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kemajuan Kemaritiman dan Perdagangan di Nusantara Abad XVI-XVII M. *Thaqafiyat: Jurnal Bahasa, Peradaban Dan Informasi Islam*, 21(1).
- Rahmawati, A. (2017). Efektivitas Program Penyelenggaraan Diklat di badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2).
- Septiawan, F. D., Nainggolan, J. P., & Pradana, M. R. (2022). Aktivitas Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Surabaya Tahun 1800-1830. *Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya Dan Pengajarannya*, 16(1).
- Sobirin, A. (2014). *Organisasi dan Perilaku Organisasi*. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKMA4158-M1.pdf>
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suryani, D., Pratiwi, A. Y., Sunarji, & Hendrawan, A. (2018). Peran Syahbandar dalam Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Saintara*, 2(2).